

Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Government Governance

Ni'Ma Nurbait Halid^{1*}, Niswatin², Ronald S. Badu³

Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Government Governance pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Gorontalo. Latar belakang penelitian ini berangkat dari urgensi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, terbuka, dan berlandaskan hukum, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan di sektor publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory research, di mana data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden dan dianalisis menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAKIP berpengaruh signifikan terhadap penerapan Good Government Governance di BBPOM Gorontalo, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,684. Hal ini mengindikasikan bahwa 68,4% variasi dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat dijelaskan oleh kualitas pelaksanaan SAKIP. SAKIP terbukti tidak hanya sebagai perangkat teknis birokrasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan tata kelola yang partisipatif dan bertanggung jawab. Namun demikian, efektivitas implementasi SAKIP masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan substansial di lapangan, seperti kasus peredaran kosmetik ilegal dan obat berbahaya. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan dalam sistem pengawasan, pelaporan kinerja yang berbasis data, serta internalisasi budaya kerja yang berorientasi pada akuntabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara SAKIP dan prinsip Good Governance merupakan kunci untuk membangun pemerintahan yang adaptif, transparan, dan dipercaya publik.

Kata Kunci: SAKIP, Good Government Governance, akuntabilitas, transparansi BBPOM di Gorontalo

Abstract

This study aims to analyze the effect of the implementation of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) on the application of Good Government Governance principles at the National Agency of Drug and Food Control (BBPOM) in Gorontalo. The background of this study stems from the urgency of improving the quality of government governance that is accountable, transparent, open, and law-based, especially in facing various challenges in public sector supervision.

Pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap

This research uses a quantitative approach with an explanatory research method, where data is collected through the distribution of questionnaires to 30 respondents and analyzed using simple linear regression. The results of the study show that the implementation of SAKIP has a significant effect on the application of Good Government Governance principles at BBPOM Gorontalo, with a significance value of 0.000 and a coefficient of determination (R^2) of 0.684. This indicates that 68.4% of the variation in the application of good governance principles can be explained by the quality of SAKIP implementation. SAKIP proves to be not just a technical tool for bureaucracy but also an important instrument in creating participatory and accountable governance. However, the effectiveness of SAKIP implementation still faces challenges, particularly in terms of substantial field supervision, such as cases of illegal cosmetics and dangerous drugs circulation. Therefore, strengthening the monitoring system, performance reporting based on data, and the internalization of a work culture oriented towards accountability are necessary. This study concludes that the integration of SAKIP and Good Government principles is the key to building adaptive, transparent, and trusted government.

Keywords: SAKIP, Good Government Governance, accountability, transparency, BBPOM di Gorontalo

Copyright (c) 2025 Ni'Ma Nurbait Halid

✉ Corresponding author :

Email Address : nimanurbaithalid13@gmail.com

PENDAHULUAN

Good Governance mulai dirintis dan diterapkan secara serius sejak era reformasi. Sebelumnya, pemerintah bersama masyarakat menghadapi tuntutan yang semakin tinggi untuk menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan berkualitas. Istilah good governance pertama kali dikenal secara luas oleh Bank Dunia pada tahun 1990-an sebagai respon terhadap kelemahan konsep pemerintahan sebelumnya, yang dianggap tidak cukup menghargai peran masyarakat dalam partisipasi pemerintahan dan pembangunan (Ariatin, 2021).

Governance sebagai sebuah konsep merupakan bidang yang relatif baru, yang mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk akuntansi (Khumaidi & Niswatin, 2023). Prinsip-prinsip utama Good Governance, seperti akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan penegakan hukum, menjadi pedoman penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memenuhi tuntutan publik dengan cara yang profesional dan bertanggung jawab.

Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah nyata dalam reformasi birokrasi adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP dirancang untuk membantu instansi pemerintah dalam mengukur kinerja mereka serta menghasilkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penerapan sistem ini pertama kali diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian digantikan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Peraturan ini menetapkan kerangka hukum untuk SAKIP, yang membantu setiap instansi pemerintah menciptakan sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan hingga penilaian kinerja.

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban mereka dalam mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan

implementasi organisasi. Sistem ini mencakup berbagai komponen, mulai dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaksanaan kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi kinerja. Keselarasan dan konsistensi dari berbagai komponen ini sangat penting, dan perubahan pada sistem tata kelola diperlukan untuk mencapai akuntabilitas dan Good Governance (Sitti, 2020).

Akuntabilitas tercermin dari kemampuan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan hasil kerjanya kepada publik. Keberhasilan kinerja yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik, yang bersumber dari praktik transparansi dan akuntabilitas yang efisien (Khumaidi & Niswatin, 2023). Selain itu, melalui partisipasi pemangku kepentingan, proses perencanaan dan evaluasi kinerja dapat menjadi lebih relevan dan diterima secara luas. Penerapan SAKIP yang efektif akan tercapai apabila sistem ini berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Di sektor publik, beberapa instansi telah berhasil menunjukkan penerapan SAKIP yang efektif dan bahkan memperoleh penghargaan kinerja secara nasional. Hal ini membuktikan bahwa dengan komitmen yang kuat dan dukungan teknologi yang tepat, SAKIP dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk mendorong transformasi organisasi. Kesuksesan penerapan SAKIP biasanya dimulai dari kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan visi organisasi dengan langkah-langkah strategis yang konkret, serta memastikan seluruh jajaran organisasi memahami pentingnya akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, integrasi antara SAKIP dan prinsip Good Governance menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang kompetitif dan terpercaya.

Namun, efektivitas penerapan SAKIP dan prinsip Good Governance pada lembaga teknis seperti BPOM masih menimbulkan beberapa pertanyaan. Hal ini tercermin dari berbagai kasus yang muncul di media, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam fungsi pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas lembaga. Sebagai contoh, di Provinsi Gorontalo, Balai Besar POM mencatat 223 kasus pelanggaran peredaran kosmetik dan skincare ilegal sepanjang tahun 2024. Kasus-kasus tersebut meliputi temuan produk tanpa izin edar, produk yang mengandung bahan berbahaya, hingga produk palsu yang dijual bebas di pasaran. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo mengimbau masyarakat untuk lebih aktif melaporkan produk mencurigakan, yang mencerminkan bahwa sistem pengawasan internal BBPOM belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan peredaran produk ilegal tanpa adanya partisipasi masyarakat (Gorontalo, 2024).

Selain itu, pada tahun 2022 terjadi kasus besar yang mendapat perhatian nasional, yaitu kasus cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dalam obat sirup anak yang menyebabkan puluhan kematian anak di Indonesia. BPOM yang bertanggung jawab atas pengawasan obat mendapat sorotan tajam karena dianggap gagal dalam melakukan deteksi dini dan pengendalian atas produk berbahaya tersebut. Meski pihak BPOM mengklaim tidak kecolongan, mereka mengakui adanya "celah dalam sistem pengawasan yang dimanfaatkan oleh produsen", yang menunjukkan masih lemahnya kontrol kualitas dan integritas sistem pengawasan internal (Kompas.com, 2022).

METODOLOGI

Penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Explanatory research dapat diartikan sebagai suatu studi yang menguraikan posisi beberapa variabel dalam suatu penelitian dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen, (Sugiyono, 2023). Explanatory research digunakan untuk menguji

hubungan antar variabel atau untuk menentukan apakah suatu variabel memiliki asosiasi dengan variabel lain serta untuk mengetahui apakah suatu variabel dipengaruhi oleh variabel lain atau tidak (Mulyadi, 2011). Dapat disimpulkan explanatory research ini merupakan jenis penelitian yang menjelaskan adanya hubungan atau pengaruh dari antar variabel dalam suatu penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti akan menguji apakah terdapat pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan Good Government Governance pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo. Adapun cara untuk menggali data dengan melakukan metode survey, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari responden melalui penggunaan kuesioner (Utomo, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran/deskripsi mengenai tanggapan dari responden mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas, yaitu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) (X) dan satu variabel terikat Good Government Governance (Y).

Analisa Deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk menentukan skor rata-rata (mean). Untuk melakukan penilaian, maka peneliti mengelompokkan skor rata-rata (mean) menggunakan rumus interval. Untuk mengetahui mayoritas jawaban pada masing-masing item maka dapat dirumuskan sebagaimana dijelaskan (Sugiyono, 2023) sebagai berikut :

$$\text{Panjang kelas} = \frac{\text{Nilai Tertinggi}-\text{Nilai Terendah}}{\text{Banyak Kela}}$$

Melalui rumus tersebut, dengan banyak kelas berjumlah 5, maka dapat ditentukan Panjang kelas sebagai berikut :

$$\text{Panjang kelas} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Perhitungan rumus diatas mendapatkan hasil nilai interval yakni diketahui sebesar 0.8, hasil tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 4. 9 Nilai Rata-Rata

No	Nilai Rata-Rata	Kriteria
1	1 – 1,8	Tidak Baik
2	>1,8 – 2,6	Kurang Baik
3	>2,6 – 3,4	Sedang
4	>3,4 – 4,2	Baik
5	>4,2 – 5	Sangat Baik

Sumber : Data Primer olahan Peneliti (2025)

1. Distribusi Jumlah Variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (X)

a. Indikator Rencana Strategis

Data Item Pernyataan Indikator Rencana Strategis

Pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap

Pernyataan	STS		TS		RR		S		SS		Mean
	J	%	J	%	J	%	J	%	J	%	
X1.1	0	0%	0	0%	0	0%	6	20%	24	80%	4.80
X1.2	0	0%	0	0%	0	0%	6	20%	24	80%	4.80
X1.3	0	0%	0	0%	0	0%	7	23%	23	77%	4.77
X1.4	0	0%	0	0%	0	0%	6	20%	24	80%	4.80

Sumber : Data Primer olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan penyebaran kuesioner terhadap 30 responden dengan pernyataan indikator partisipasi didapatkan hasil rata-rata (mean) pada tabel 4.10. dapat diketahui data diatas menunjukkan bahwa rata-rata dari empat pernyataan yaitu 4,80 dan 4,77 menunjukkan hasil dengan kriteria sangat baik. Pernyataan yang memiliki rata-rata terbesar terdapat pada pernyataan 1 "Visi program instansi tempat saya bekerja telah ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi", pernyataan 2 "Misi program instansi tempat saya bekerja telah ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi", dan pernyataan 4 "Pada instansi tempat saya bekerja telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan" dengan nilai mean 4,80, yang mengindikasikan bahwa visi dan misi program pada BBPOM di Gorontalo telah ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi, serta untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan telah menetapkan indikato kinerja secara baik.

b. Indikator Rencana Kinerja

Data Item Pernyataan Indikator Rencana Kinerja

Pernyataan	STS		TS		RR		S		SS		Mean
	J	%	J	%	J	%	J	%	J	%	
X1.1	0	0%	0	0%	0	0%	10	33%	20	67%	4.67
X1.2	0	0%	0	0%	0	0%	9	30%	21	70%	4.70
X1.3	0	0%	0	0%	1	3%	8	27%	21	70%	4.67
X1.4	0	0%	0	0%	0	0%	8	27%	22	73%	4.73

Sumber: Data Primer olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel terdapat hasil melalui penyebaran kuesioner terhadap 30 responden dengan 4 pernyataan pada indikator rencana kinerja. Dapat diketahui data diatas menunjukkan bahwa rata-rata dari empat pernyataan yaitu 4.67, 4.70, 4.76, dan 4.73 menunjukkan hasil dengan kriteria sangat bak. Pernyataan yang memiliki rata-rata terbesar terdapat pada pernyataan 4 yaitu "Pada instansi tempat saya bekerja, kejelasan sasaran anggaran suatu program telah dimengerti oleh semua pemimpin". Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan serta program yang tertuang di dalam rencana kerja telah diakomodir ke dalam rencana kerja dan anggaran pada BBPPOM di Gorontalo

c. Indikator Pengukuran Kinerja

Data Item Pernyataan Indikator Pengukuran Kinerja

Pernyataan	STS		TS		RR		S		SS		Mean
	J	%	J	%	J	%	J	%	J	%	
X3.1	0	0%	0	0%	0	0%	11	37%	19	63%	4.63
X3.2	0	0%	0	0%	0	0%	7	23%	23	77%	4.77
X3.3	0	0%	0	0%	0	0%	7	23%	23	77%	4.77

Sumber : Data Primer olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel hasil penyebaran kuesioner terhadap 30 responden menunjukkan bahwa indikator pengukuran kinerja memperoleh penilaian yang sangat baik. Terdapat tiga pernyataan yang dianalisis, dengan pernyataan pertama memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,63. Sementara itu,

pernyataan kedua, yaitu "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan merencanakan program selanjutnya", serta pernyataan ketiga, "Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan merencanakan kegiatan selanjutnya", memperoleh nilai rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 4,77.

Nilai tersebut mengindikasikan bahwa seluruh pernyataan pada indikator ini berada pada kategori sangat baik. Artinya, di BBPOM Gorontalo, pelaksanaan program dan kegiatan telah dikendalikan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas dan terukur, yang menjadi acuan dalam menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan maupun program. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) benar-benar dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program serta kegiatan berikutnya. Hal ini mencerminkan adanya budaya kerja yang berbasis pada kinerja dan akuntabilitas yang kuat di lingkungan BBPOM Gorontalo

d. Indikator Evaluasi Kinerja

Data Item Pernyataan Indikator Evaluasi Kinerja

Pernyataan	STS		TS		RR		S		SS		Mean
	J	%	J	%	J	%	J	%	J	%	
X4.1	0	0%	0	0%	2	7%	9	30%	19	63%	4.57
X4.2	0	0%	0	0%	2	7%	8	26%	20	67%	4.60
X4.3	0	0%	0	0%	2	7%	8	26%	20	67%	4.60
X4.4	0	0%	0	0%	0	0%	12	40%	18	60%	4.60

Sumber : Data Primer olahan peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel, hasil penyebaran kuesioner terhadap 30 responden menunjukkan penilaian yang sangat baik pada indikator evaluasi kinerja, yang terdiri dari empat pernyataan. Pernyataan pertama memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,57, sementara pernyataan kedua, ketiga, dan keempat masing-masing memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,60. Dengan demikian, seluruh pernyataan pada indikator ini berada dalam kategori sangat baik.

Pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada:

1. Pernyataan 2: "Adanya evaluasi efisiensi, apakah kegiatan atau program telah sesuai dengan target yang ditetapkan."
2. Pernyataan 3: "Adanya evaluasi efektivitas, apakah kegiatan atau program telah sesuai dengan target yang ditetapkan."
3. Pernyataan 4: "Dalam mengevaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi sesungguhnya."

Nilai rata-rata yang tinggi pada ketiga pernyataan ini mengindikasikan bahwa proses evaluasi kinerja di BBPOM Gorontalo telah dilaksanakan secara sistematis dan berkualitas. Evaluasi dilakukan tidak hanya dari segi efisiensi (penggunaan sumber daya), tetapi juga dari segi efektivitas (pencapaian tujuan), dengan perbandingan antara target dan realisasi yang aktual. Hal ini menunjukkan bahwa BBPOM Gorontalo telah menerapkan mekanisme evaluasi yang baik sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

e. Indikator Analisis Akuntabilitas Kinerja

Data Item Pernyataan Indikator Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pernyataan	STS		TS		RR		S		SS		Mean
	J	%	J	%	J	%	J	%	J	%	
X5.1	0	0%	0	0%	0	0%	7	23%	23	77%	4.77
X5.2	0	0%	0	0%	0	0%	8	27%	22	73%	4.73
X5.3	0	0%	0	0%	0	0%	8	27%	22	73%	4.73

Sumber : Data Primer olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel, hasil penyebaran kuesioner terhadap 30 responden pada indikator analisis akuntabilitas kinerja yang terdiri dari tiga pernyataan menunjukkan penilaian yang sangat baik secara keseluruhan. Pernyataan pertama memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,77, sedangkan pernyataan kedua dan ketiga masing-masing memperoleh nilai rata-rata 4,70. Ketiga pernyataan ini termasuk dalam kategori sangat baik.

Pernyataan dengan nilai tertinggi terdapat pada pernyataan pertama, yaitu: "Pemimpin mempertanggungjawabkan (accountable) hasil suatu program dan kegiatan yang telah dilakukan." Nilai tersebut mencerminkan bahwa pemimpin di BBPOM Gorontalo telah menunjukkan komitmen kuat terhadap akuntabilitas, khususnya dalam hal mempertanggungjawabkan hasil dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek kepemimpinan dalam hal akuntabilitas kinerja berada pada tingkat yang sangat baik, dan hal ini menjadi elemen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab.

2. Distribusi Jumlah Variabel Good Government Governance (Y)

a. Indikator Akuntabilitas

Data Item Pernyataan Indikator Akuntabilitas

Pernyataan	STS		TS		RR		S		SS		Mean
	J	%	J	%	J	%	J	%	J	%	
Y1.1	0	0%	0	0%	0	0%	10	33%	20	67%	4.67
Y1.2	0	0%	0	0%	0	0%	9	30%	21	70%	4.70
Y1.3	0	0%	0	0%	0	0%	8	27%	22	73%	4.73
Y1.4	0	0%	0	0%	0	0%	7	23%	23	77%	4.77

Sumber : Data Primer olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden terkait empat pernyataan indikator akuntabilitas, diperoleh nilai rata-rata seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.15, yaitu masing-masing sebesar 4,67; 4,70; 4,73; dan 4,77. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator berada pada kategori sangat baik.

Dari keempat pernyataan tersebut, pernyataan dengan rata-rata tertinggi adalah pernyataan keempat, yaitu "Telah mengetahui secara jelas wewenang sebagai pegawai", dengan nilai rata-rata sebesar 4,77. Hal ini menunjukkan bahwa para pegawai di BBPOM Gorontalo telah memahami dengan baik wewenang yang mereka miliki. Pemahaman yang jelas mengenai wewenang ini berkontribusi pada pelaksanaan kinerja yang sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga menghasilkan capaian yang optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas pegawai BBPOM di Gorontalo tergolong sangat baik, khususnya dalam aspek pemahaman terhadap wewenang dan tanggung jawab sebagai aparatur.

b. Indikator Transparansi

Data Item Pernyataan Indikator Transparansi

Pernyataan	STS		TS		RR		S		SS		Mean
	J	%	J	%	J	%	J	%	J	%	
Y2.1	0	0%	0	0%	0	0%	9	30%	21	70%	4.70
Y2.2	0	0%	0	0%	0	0%	11	37%	19	63%	4.63
Y2.3	0	0%	0	0%	0	0%	11	37%	19	63%	4.63
Y2.4	0	0%	0	0%	0	0%	10	33%	20	67%	4.67
Y2.5	0	0%	0	0%	1	3%	10	33%	19	63%	4.60
Y2.6	0	0%	0	0%	0	0%	12	40%	18	60%	4.60

Sumber: Data Primer olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel, hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden terhadap enam pernyataan yang mewakili indikator transparansi menunjukkan bahwa seluruh pernyataan berada pada kategori sangat baik. Rata-rata skor yang diperoleh pada masing-masing pernyataan adalah sebagai berikut:

- Pernyataan 1: 4,70
- Pernyataan 2: 4,63
- Pernyataan 3: 4,63
- Pernyataan 4: 4,67
- Pernyataan 5: 4,60
- Pernyataan 6: 4,60

Dari data tersebut, pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi adalah pernyataan pertama, yaitu "*Setiap selesainya program perlu dibuat laporan ke atas dan dipublikasikan*", dengan skor rata-rata sebesar 4,70. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaporan dan publikasi hasil program yang dilakukan oleh BBPOM di Gorontalo telah dilakukan dengan sangat baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam pelaksanaan program di BBPOM Gorontalo telah berjalan optimal. Laporan program yang disusun dan dipublikasikan secara terbuka memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait program maupun anggaran yang dijalankan. Praktik ini mencerminkan komitmen BBPOM terhadap prinsip keterbukaan informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

c. Indikator Keterbukaan

Data Item Pernyataan Indikator Keterbukaan

Pernyataan	STS		TS		RR		S		SS		Mean
	J	%	J	%	J	%	J	%	J	%	
Y3.1	0	0%	0	0%	0	0%	8	27%	22	73%	4.73
Y3.2	0	0%	0	0%	0	0%	8	27%	22	73%	4.73

Sumber : Data Primer olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel, hasil dari penyebaran kuesioner kepada 30 responden menunjukkan bahwa rata-rata skor pada dua pernyataan indikator keterbukaan adalah sebesar 4,73. Hasil ini menunjukkan bahwa keterbukaan pemerintah berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga dipandang mampu mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

d. Indikator Aturan Hukum

Data Item Pernyataan Indikator Aturan Hukum

Pernyataan	STS		TS		RR		S		SS		Mean
	J	%	J	%	J	%	J	%	J	%	
Y4.1	0	0%	0	0%	0	0%	7	23%	23	77%	4.77
Y4.2	0	0%	0	0%	0	0%	8	27%	22	73%	4.73
Y4.3	0	0%	0	0%	0	0%	10	33%	20	67%	4.67

Sumber : Data Primer olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan penyebaran kuesioner kepada 30 responden dengan tiga pernyataan yang menjadi indikator aturan hukum, diperoleh hasil rata-rata seperti yang tercantum dalam Tabel 4.18. Data tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari ketiga pernyataan masing-masing adalah 4,77; 4,73; dan 4,67. Ketiga nilai ini berada dalam kategori sangat baik. Pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan pertama, yaitu: “Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik, instansi tempat saya bekerja telah mentaati hukum”, dengan skor rata-rata sebesar 4,77.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas publik di BPPOM Gorontalo telah dilakukan dengan ketaatan terhadap hukum yang sangat baik.

3. Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (X)

Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Balai Besar POM di Gorontalo

No	Indikator	Rata-rata	Kategori
1	Rencana Strategis	4.79	Sangat Baik
2	Rencana Kerja	4.69	Sangat Baik
3	Pengukuran Kinerja	4.72	Sangat Baik
4	Evaluasi Kinerja	4.59	Sangat Baik
5	Analisis Akuntabilitas Kinerja	4.74	Sangat Baik
Rata-rata Variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		4.70	Sangat Baik

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel, diketahui bahwa indikator Evaluasi Kinerja memiliki nilai rata-rata terendah sebesar 4,59, sedangkan indikator Rencana Strategis memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,79. Secara keseluruhan, rata-rata variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berada pada angka 4,70, yang termasuk dalam kategori sangat baik.

Nilai rata-rata terendah pada indikator Evaluasi Kinerja sejalan dengan temuan hasil wawancara bersama informan dari pihak BBPOM di Gorontalo. Informan menyampaikan bahwa pelaksanaan evaluasi kinerja masih terbatas pada aspek efisiensi. Dalam pernyataannya, informan menjelaskan:

“Jadi, terkait evaluasi kinerja memang belum ada evaluasi yang secara kualitatif yang lebih terperinci. Dan evaluasinya itu hanya terkait efisiensi saja. Memang sudah ada di laporan kinerja terkait evaluasi kinerja itu. Dia hanya terkait efisiensi. Jadi untuk evaluasi yang secara detail itu memang belum dilakukan. Makanya survei itu belum mengetahui secara pasti atau ragu-ragu terkait itu. Jadi evaluasi belum menyeluruh terkait ekonomi dan efektivitas. Yang sudah baku dan yang paten itu hanya evaluasi efisiensi. Itu memang jelas ada di laporan kinerja tahunan atau interim yang tiap 3 bulan, itu ada.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun aspek efisiensi telah diakomodasi dalam laporan kinerja secara rutin, namun evaluasi terhadap aspek ekonomi dan efektivitas belum dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Hal ini turut memengaruhi persepsi responden dalam survei, yang menunjukkan keraguan terhadap kelengkapan pelaksanaan evaluasi kinerja, sehingga berkontribusi pada rendahnya nilai indikator tersebut dibandingkan dengan indikator lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja yang mencakup tidak hanya efisiensi, tetapi juga aspek efektivitas dan ekonomi secara komprehensif. Evaluasi yang menyeluruh akan memberikan gambaran yang lebih lengkap terhadap pencapaian kinerja instansi, serta menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat ditingkatkan secara signifikan, seiring dengan penerapan prinsip good governance yang lebih optimal

4. Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Variabel Good Government Governance (Y)

Rekapitulasi Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Good Government Governance

No	Indikator	Rata-rata	Kategori
1	Akuntabilitas	4.71	Sangat Baik
2	Transparansi	4.63	Sangat Baik
3	Keterbukaan	4.73	Sangat Baik
4	Aturan Hukum	4.72	Sangat Baik
Rata-rata Variabel Good Government Governance (Y)		4.68	Sangat Baik

Sumber : Data Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel, diketahui bahwa indikator Transparansi memiliki nilai rata-rata terendah yaitu sebesar 4,63, sedangkan indikator Keterbukaan menunjukkan nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,73. Dari keseluruhan indikator, rata-rata variabel Good Government Governance diperoleh sebesar 4,68, yang masuk dalam kategori sangat baik.

Meskipun secara umum prinsip-prinsip pemerintahan yang baik telah diterapkan dengan sangat baik, hasil ini mengindikasikan bahwa aspek transparansi, khususnya terkait informasi publik, masih menjadi titik lemah yang perlu diperbaiki. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu informan dari BBPOM di Gorontalo, yang menyatakan:

"Terkait transparansi itu, memang dalam beberapa item arus kas itu memang sudah masuk di laporan keuangan. Sehingga tidak ada laporan tersendiri dengan judul dengan dokumen yang tersendiri. Dia sudah masuk di laporan keuangan. Dan juga mungkin yang menjadi keraguan responden, dia belum update dan tidak ditampilkan di media sosial, hanya ditampilkan pada subsite gorontalo.pom.go.id. Jadi ketentuan terkait informasi publik itu diatur oleh Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun informasi keuangan telah dipublikasikan, cara penyajiannya masih belum cukup efektif dalam menjangkau publik secara luas. Informasi yang hanya tersedia melalui subsite

resmi dan tidak diunggah secara aktif melalui media sosial dianggap kurang optimal dalam membangun persepsi keterbukaan publik. Selain itu, ketiadaan dokumen khusus yang secara eksplisit membahas transparansi arus kas turut memengaruhi aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan instansi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan transparansi dengan cara menyajikan informasi secara lebih sistematis, mudah diakses, dan diperbarui secara berkala melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial resmi. Upaya ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menekankan pentingnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan prinsip transparansi dalam penerapan Good Government Governance di lingkungan Balai Besar POM Gorontalo dapat terwujud secara lebih optimal.

Pembahasan

Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan Good Government Governance

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Government Governance di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Gorontalo. Hasil uji regresi linier sederhana memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,000, jauh di bawah ambang batas 0,05. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,684 mengindikasikan bahwa 68,4% variasi dalam penerapan Good Government Governance dapat dijelaskan oleh kualitas implementasi SAKIP.

Temuan ini menegaskan bahwa SAKIP tidak sekadar berfungsi sebagai alat teknis manajemen birokrasi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. SAKIP menyediakan kerangka kerja menyeluruh mulai dari perencanaan, penetapan indikator, pelaksanaan program, hingga evaluasi dan pelaporan. Ketika dijalankan secara konsisten, sistem ini memperkuat akuntabilitas publik dengan mengarahkan perhatian tidak hanya pada output administratif, tetapi juga pada dampak nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, implementasi SAKIP yang baik mendorong transparansi dengan membuka akses publik terhadap informasi kinerja, alokasi anggaran, dan kendala pelaksanaan, yang sebelumnya hanya tersedia di lingkup internal birokrasi. Publikasi ini, melalui LAKIP dan media lainnya, memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi dalam pengawasan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa SAKIP belum sepenuhnya menutup celah dalam pengawasan, khususnya terkait responsivitas dan mutu pengendalian di lapangan. Masih ditemukannya kasus peredaran kosmetik ilegal dan pangan berbahaya hingga tahun 2024 menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaporan formal dan realisasi substantif kinerja.

Dalam perspektif teori stewardship, aparatur negara dipandang sebagai pelayan publik yang bertindak atas kepentingan organisasi dan masyarakat. Ketika SAKIP diimplementasikan dengan semangat ini, pelaporan kinerja menjadi bentuk tanggung jawab moral, bukan sekadar kewajiban administratif.

Secara keseluruhan, implementasi SAKIP di BBPOM Gorontalo telah berkontribusi dalam memperkuat prinsip-prinsip Good Government Governance, terutama dalam membangun sistem pertanggungjawaban yang terbuka dan sistematis. Meski demikian, efektivitas SAKIP masih perlu ditingkatkan agar mampu menjawab tantangan nyata di bidang pengawasan obat dan makanan. Oleh karena itu,

keberhasilan SAKIP sangat bergantung pada internalisasi sistem ini sebagai budaya kerja yang dijalankan secara konsisten di seluruh lini organisasi.

Sebagai catatan akhir, apabila implementasi SAKIP hanya sebatas penyusunan dokumen untuk memenuhi kewajiban administratif, maka esensi dari sistem ini akan hilang. SAKIP harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang tidak hanya mengukur, tetapi juga mendorong transformasi organisasi menuju tata kelola yang adaptif, reflektif, dan bertanggung jawab. Dalam konteks BBPOM, tantangan yang ada menjadi pengingat bahwa upaya memperkuat good governance merupakan proses yang harus terus dijaga dan dikembangkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan Good Government Governance pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa implementasi SAKIP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan di instansi tersebut.

Semakin optimal pelaksanaan unsur-unsur utama dalam SAKIP—meliputi perencanaan strategis, pengukuran kinerja, evaluasi, dan pelaporan—maka semakin tinggi pula penerapan prinsip-prinsip Good Government Governance seperti akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepastian hukum.

Dengan demikian, SAKIP tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan bertanggung jawab di lingkungan BBPOM Gorontalo.

SARAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara praktis maupun akademis:

1. Untuk Balai Besar POM di Gorontalo, implementasi SAKIP yang telah berjalan dengan baik perlu terus ditingkatkan, khususnya dengan pemberian paparan dan pembekalan secara berkala kepada seluruh pegawai sesuai dengan fungsi dan jabatan masing-masing, agar setiap individu memahami perannya dalam siklus SAKIP. Paparan tersebut mengacu pada pedoman SAKIP yang berlaku, seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta Permenpan & RB terkait, sehingga pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara tepat, terstandar, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Penguatan mekanisme evaluasi dan umpan balik kinerja menjadi hal krusial yang perlu dilakukan. Evaluasi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai alat refleksi dan pembenahan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan evaluasi yang berbasis data dan analisis mendalam, instansi dapat secara lebih akurat mengidentifikasi kelemahan serta merumuskan strategi perbaikan yang terukur dan tepat sasaran.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam berbagai faktor lain yang memengaruhi efektivitas implementasi SAKIP dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian lanjutan sebaiknya menggunakan pendekatan gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, serta memperluas objek studi ke instansi teknis lainnya, guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan kontekstual mengenai dinamika pelaksanaan SAKIP di berbagai sektor pemerintahan.

Referensi :

- Ariatin, D. (2021). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Terhadap Penerapan Good Governance Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau. 1–66.
- Gorontalo, T. N. (2024). BPOM Gorontalo Tangani 223 Kasus Kosmetik Skincare, Kabalai Minta Masyarakat tAktif Melaporkan. *Tribun Gorontalo.Com*. <https://gorontalo.tribunnews.com/2024/05/18/bpom-gorontalo-tangani-223-kasus-kosmetik-skincare-kabalai-minta-masyarakat-aktif-melaporkan>
- Kompas.com. (2022). BPOM soal Pengawasan Obat Sirup: Kami Tidak Kecolongan, tetapi Ada Celah dari Hulu ke Hilir. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/18/10213081/bpom-soal-pengawasan-obat-sirup-kami-tidak-kecolongan-tetapi-ada-celah-dari?page=all>
- Kompas.com. (2024). Kok Bisa BPOM “Kecolongan” Ada Latiao Terkontaminasi Bakteri Beredar di Indonesia? *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/02/183000065/kok-bisa-bpom-kecolongan-ada-latiao-terkontaminasi-bakteri-beredar-di?page=all>
- Khumaidi, D., & Niswatin. (2023). Strategi Pengelolaan BUMDES Durensewu Dalam Pendekatan Good Corporate Governance. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 01(11), 40–50.
- Niswatin and Ivan Rahmat Santoso (2025). Factors affecting non-performing finance in Islamic banking in Indonesia’s agricultural sector. *Banks and Bank Systems*, 20(1), 323-333.
- Niswatin. Latif, M. A. B. R. S. (2022). Sistem Kompensasi Bagi Driver atas Orderan Fiktif di Perusahaan Grab Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(3), 144–153.
- Sitti, M. (2020). Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo. *JEMA Adpertisi*, 1(2), 59–77. <http://journal.adpertisi.or.id/index.php/jr/index%0D>

Peraturan-Peraturan :

- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)
- Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.